

PRASYARAT KEBERHASILAN KERJA SAMA SISTER PROVINCE : STUDI KASUS SISTER PROVINCE ANTARA JAWA TENGAH DENGAN PROVINSI FUJIAN-CINA.

Oleh : Hermi S.

Abstract : *The implementation of Indonesian local government autonomy gives many consequences. One of it is the augmentation of cooperation with foreign countries conducted by local government. One type of the cooperation is sister province. This cooperation still bring lack of success story and best practices. Rather brings clear profits, mostly sister province cooperation has no clear benefits. By using the case of sister province cooperation between Central Java province and Fujian, this research providing the answer why central java wants to cooperate with Fujian under the scheme sister province due to the massive criticism of Free Trade Area with China. By using Scholte's Globalization approach, and Botenbal's lowered politics issue this paper argue that the sister province cooperation between Central Java and Fujian is being conduct for the cause of spillover effect and due to long road historical demographic background between these two provinces.*

Key Words: *Sister province, kerjasama, prasyarat, keberhasilan*

Pendahuluan

UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memberikan kemungkinan bagi pemerintah daerah, baik pemerintah kota/kabupaten maupun pemerintah provinsi, menyelenggarakan hubungan dengan pihak asing secara langsung. Selain itu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara teknis memberikan wewenang bagi daerah, untuk melakukan perjanjian internasional, termasuk dalam hal ini kerjasama internasional.

Aplikasi dari berbagai undang-undang tersebut adalah meningkatnya berbagai kerjasama antara daerah-daerah di Indonesia dengan pihak asing. Salah satu bentuk kerjasama yang kini cukup meningkat pesat adalah diberlakukannya kerjasama *sister province* atau *sister city*. Menurut data Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, tercatat saat ini sebanyak 47 pemerintah kota dan 16 pemerintah provinsi melaksanakan hubungan kemitraan dalam bentuk kota-kembar atau provinsi-kembar. Berbagai kebijakan serta anjuran pun telah dikeluarkan oleh pemerintah agar pemerintah kota/daerah dapat memanfaatkan kerjasama kota-kembar untuk menyokong

pembangunan di daerah (www.akln.setjen.depdagri.go.id/).

Kerjasama provinsi kembar antara Jawa Tengah dengan Queensland sendiri misalnya sudah dilakukakan sejak penandatanganan MoU antara kedua provinsi tersebut sejak tahun 1991. Berbagai kerjasama mulai dari budaya hingga ekonomi pun telah dilaksanakan diantara Jawa Tengah dengan Queensland (www.pdkjateng.go.id 26/10/2010). Sedangkan hubungan *sister province* antara Jawa Tengah dengan Fujian sendiri dapat dikatakan tergolong baru. Kerjasama provinsi kembar diantara Fujian dan Jawa Tengah sendiri baru mulai dilaksanakan pada 12 Juni 2003 (www.en.fjta.com).

Selain tergolong merupakan kerjasama *sister province* yang baru, hubungan provinsi kembar antara Jawa Tengah dan Fujian menarik untuk dibahas tersendiri. Pertama, dikarenakan Jawa Tengah, dalam hal ini khususnya Semarang, memang telah memiliki sejarah hubungan yang cukup intens dengan negeri Cina. Hal ini dapat dijumpai dari sejarah pengiriman utusan diplomatik dari kerajaan Cina pada masyarakat Jawa Tengah melalui diutusnya Laksamana Cheng Ho oleh kaisar Cina pada abad ke-14 (www.english.people.com.cn 03/08/2005). Kedua, hubungan provinsi kembar antara Jawa Tengah dan Fujian sendiri tergolong unik mengingat kerjasama ini dibuka ketika Indonesia mulai aktif dalam

perjanjian *free trade area* ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang diberlakukan pada tahun 2010 (www.atimes.com/06/11/2002).

Posisi ACFTA sendiri yang merupakan bentuk kerjasama FTA terbesar didunia; pada awalnya diharapkan mampu meningkatkan neraca perdagangan antara Cina dengan Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya. Namun sejumlah kritikan juga muncul dari pelaksanaan ACFTA itu sendiri. Keberadaan ACFTA dianggap merugikan laju perekonomian Indonesia sendiri, dikarenakan industry dalam negeri Indonesia kalah bersaing dengan laju pertumbuhan industry Cina yang cukup pesat (www.ibl.or.id/04/04/2011).

Kerjasama *sister province* tersebut dapat dimaklumi dikarenakan akar sejarah yang memang dapat dikatakan cukup kuat diantara Jawa Tengah dan Cina; Namun. Juga menimbulkan pertanyaan dikarenakan hubungan *sister province* ini dicanangkan ketika ACFTA mulai berjalan di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia; dan banyak menuai kritikan.

Kerjasama *sister province* sendiri pada dasarnya merupakan bentuk dari multi track diplomacy dan mengkhususkan sebagai sarana diplomasi public sebuah negara melalui hubungan *people to people* untuk mencapai kepentingan bersama diantara dua negara pada umumnya dan provinsnis atau kota pada khususnya (www.sister-cities.org). Artinya, mau tidak mau semestinya ada pertimbangan kuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat diperoleh melalui kerjasama *sister city* atau *province* tersebut. Namun hingga saat ini, hubungan antara Indonesia dengan Cina terutama dalam hal ekonomi-melalui diberlakukannya ACFTA justru sering menimbulkan kritikan diakrenaka dianggap merugikan posisi Indonesia. Sebagai contoh, hingga pertengahan tahun 2011, diantara 5 negara besar ASEAN, Indonesia merupakan Negara ASEAN satu-satunya yang mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina. Kegiatan impor produk china oleh Indonesia pada tahun 2005 tercatat hanya 12 persen dan ternyata terus meningkat menjadi 20 persen pada tahun 2010 (www.bisnis.news.viva.co.id/02/05/2011). Oleh karena itu kerjasama *sister province* antara Jawa Tengah dengan Fujian menarik untuk dibahas dikarenakan dua provinsi ini juga memiliki

sumbangsih ekonomi yang baik bagi negara masing-masing.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka keberadaan kerjasama provinsi kembar antara Provinsi Jawa Tengah dengan Fujian menarik untuk dikaji. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas dua rumusan masalah, yakni: Pertama, bagaimanakah implementasi kerjasama provinsi kembar anantara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina; Kedua, mengapa Provinsi Jawa Tengah mau melakukan kerjasama dengan provisini Fujian-Cina?

Dengan menggunakan pendekatan Globalisasi yang dikemukakan oleh Scholte (2000) dan konsep *low politic* yang dikemukakan oleh Botenbal (2009) serta menkankan pada pendekatan *complex interdependency* dan tidak hanya menfokuskan pada pendekatan ekonomi-hukum, namun juga menggunakan pendekatan sejarah demografis, maka dalam tulisan ini diangkat gagasan teraju bahwa kerjasama *sister province* antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina, dilakukan dalam rangka menciptakan sebuah hubungan yang bersifat kompleks dan *interdependence* antara Jawa Tengah dan Fujian yang pada gilirannya mampu menciptakan efek *spill over* yang pada gilirannya mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya.

Jembatan Teoritik

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, setidaknya dibutuhkan kerangka pemikiran yang mampu menunjukkan dua hal. Pertama, dibutuhkan kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan praktek kerjasama *sister province*. Kedua, dibutuhkan kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan alasan dua aktor internasional terutama di dalam sebuah Negara, mau melakukan kerjasama dengan negara lain.

Kerangka pemikiran pertama dapat dilacak dari karya Bontenbal & Lindert (2009) menyatakan bahwa konsep kota-kembar masih relatif baru dalam wacana akademik mengenai kerjasama pembangunan. Jumlah akademisi dan studi kerjasama internasional antarkota masih sangat terbatas, dan tujuan, hasilnya, struktur organisasinya, faktor-faktor kesuksesan dan kegagalannya masih belum diketahui. Hubungan

kerjasama ini menjadi bahan pembahasan berbagai disiplin ilmu seperti administrasi publik, geografi pembangunan, sosiologi, ilmu pendidikan, studi pembangunan, ilmu politik dan hubungan internasional.

Kota-kembar merupakan konsep relatif baru dalam kajian Hubungan Internasional. Ide mengenai kota-kembar lahir sebagai akibat adanya kesadaran global bahwa masyarakat atau komunitas-komunitas seluruh dunia semakin bergantung satu sama lain. Untuk dapat memahami mengapa pelaksanaan kota-kembar perlu didukung untuk menunjang pembangunan dalam negeri serta perwujudan perdamaian antarnegara, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, di antaranya pendekatan globalisasi, interdependency atau saling ketergantungan, dan fungsionalisme.

Pendekatan pertama yakni pendekatan studi globalisasi. Menurut pendekatan ini kemunculan kota-kembar sebagai sebuah fenomena tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi. Globalisasi dapat dipahami sebagai proses meluas, mendalam, dan semakin cepatnya hubungan-hubungan manusia secara mengglobal (Friedman 2005). Akibatnya, terciptalah sebuah dunia dimana perkembangan di suatu tempat mau tidak mau akan mempengaruhi kehidupan komunitas di tempat lain. Dalam era globalisasi, menurut Jan Aart Scholte (2000), negara tidak lagi menjadi aktor tunggal di tataran internasional. Globalisasi memberikan kesempatan bagi entitas-entitas supra-state dan sub-state untuk dapat berpartisipasi dalam pola-pola interaksi lintas batas negara. Globalisasi telah mendorong peningkatan mekanisme pemerintahan, yang bersifat lebih longgar dan terbagi-bagi antara pemerintah pusat (sebagai entitas state) dan pemerintah daerah (sebagai entitas sub-state).

Menurut asumsi Scholte (2000) ini maka pembentukan kota-kembar merupakan konsekuensi logis dengan terwujudnya partisipasi pemerintah daerah atau perkotaan sebagai entitas sub-state dalam hubungan transnasional. Sejalan dengan yang diungkapkan Scholte, Bontenbal (2009) menyatakan bahwa pada masa pemerintahan yang semakin terdesentralisasi di era globalisasi dan urbanisasi, peningkatan peran dan partisipasi pemerintah daerah dalam hubungan transnasional menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Peran

dan partisipasi pemerintah daerah tersebut diperlukan dalam menunjang pembangunan daerah, melalui pertukaran ilmu, transfer sumber daya dan teknologi, serta kerjasama strategis. Kota-kembar tidak hanya melibatkan pemerintahan daerah sebagai administrator, tapi juga melibatkan masyarakat perkotaan, untuk mengadakan kerjasama terkait dengan beberapa isu strategis seperti (1) pengentasan kemiskinan; (2) penguatan institusi; (3) terciptanya perdamaian dan demokrasi; (4) terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (5) perwujudan *Millennium Development Goals* (MDGs).

Selain pendekatan globalisasi diatas, kajian seputar sister city dapat juga dijumpai pada kajian kalangan interdependensi dalam studi HI. Pendekatan interdependensi terkait erat dengan pendekatan globalisasi terhadap konsep sister city. Menurut Keohane dan Nye (2000), globalisasi sendiri merupakan bentuk interdependensi, namun dengan dimensi hubungan yang lebih kompleks melalui network of connections dalam bidang yang multidimensional. Interdependensi sendiri dipahami sebagai adanya hubungan yang berdampak timbal balik (*reciprocal effect*) antara dua entitas yang mengadakan kerjasama. Pola interdependensi yang demikian dikenal dengan istilah *complex interdependence*.

Selain itu, masih menurut Keohane dan Nye (2000), pola-pola interdependensi tersebut mencakup hubungan yang kompleks dalam berbagai bidang (multi dimensional), termasuk ke dalamnya bidang ekonomi, politik, militer, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya saat ini, isu keamanan dan militer tidak lagi menjadi isu yang sentral. Isu ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi isu yang muncul dalam *complex interdependence* yang terjadi dewasa ini. Produk kerjasama yang dihasilkan dapat meliputi sejumlah area isu seperti perdagangan, lingkungan, teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya.

Dari pendekatan interdependensi ini, kota-kembar dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama dan produk pola hubungan yang bersifat kompleks dan mutakhir. Kompleks karena dalam kerjasama kota-kembar banyak pihak yang turut terlibat di dalamnya, baik pemerintah pusat, pemerintah kota maupun kelompok masyarakat. Bidang yang digarap dalam kerjasama kota-kembar pun meliputi

bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

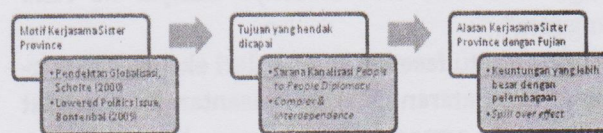
Pendekatan Fungsionalisme. Menurut McGowan (2007) pendekatan fungsionalisme menekankan bahwa perdamaian dan kesejahteraan dapat dicapai melalui instrumen-instrumen yang bersifat *low politics* seperti ekonomi, sosial dan budaya. Melalui kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, maka akan terjadi *spillover effect* yang mengarahkan kerjasama tersebut ke tingkat integrasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, melalui instrumen *low politics* terciptalah harmoni antar negara dengan adanya mutual understanding antara kedua negara. Kota-kembar sebagai bentuk kerjasama menitikberatkan pada bidang-bidang *low politics* seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Kerjasama ini merupakan suatu bentuk Diplomasi Publik, atau yang dikenal sebagai *people to people diplomacy*, yang dapat mendukung terjadinya kerjasama yang baik antar kedua negara. dengan demikian dapat diciptakan *spillover effect* dengan berkembangnya kerjasama antardua negara di tingkat yang lebih tinggi (*interstate cooperation*).

Sedangkan penjelasan mengenai mengapa aktor internasional cenderung berinteraksi lewat kerjasama internasional yang terlembaga dapat dijumpai dari karya Kenneth W. Abbott & Duncan Snidal (1998). Bergabungnya Negara-negara dalam berbagai organisasi internasional, dikarenakan melalui kerjasama internasional dalam wadah organisasi internasional maka banyak keuntungan-keuntungan yang justru diperoleh Artinya jika asumsi ini ditarik kedalam kasus *sister province*, pelebagaan kerjasama internasional antar provinsi dengan provinsi lain dilakukan sebagai bentuk pelebagaan kerjasama internasional antar provinsi dalam suatu negara dengan provinsi di negara lain, sehingga lebih memudahkan berbagai kerjasama yang diinginkan.

Dengan pendekatan landasan pemikiran diatas, maka kerangka pemikiran yang dibangun dalam penelitian ini adalah, implementasi kerjasama *sister province* dilandasi pemikiran bahwa kerjasama *sister province* didasari pada pemahaman bahwa kerjasama tersebut (merujuk pada pemikiran kalangan globalis) merupakan bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam hubungan internasional ditengah era globalisasi. Lebih lanjut, pemikiran Bontenball (2009) menjelaskan bahwa kerjasama

tersebut ditujukan pada isu yang beragam, mulai dari pembangunan daerah, ilmu pengetahuan serta transfer teknologi. Dengan kata lain, maka era globalisasi memberikan kondisi saling ketergantungan antara berbagai wilayah di dunia termasuk provinsi yang kini juga ikut andil dalam hubungan internasional. Adanya interdependensi antar provinsi lintas batas negara tersebut menggambarkan fenomena kompleks dan masalisasi hubungan internasional yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah pusat, sehingga memungkinkan tercipta diplomasi *people to people*. Dengan kata lain, kerjasama *sister province* merupakan salah satu bentuk kanalisasi *people to people diplomacy* itu sendiri.

Lebih lanjut, dari landasan pemikiran fungsionalisme maka dapat dijawab alasan mengapa meski ditengah ACFTA yang sering disebut kurang menguntungkan Indonesia, kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian tersebut tetap dilaksanakan. Melalui pemikiran Kenneth W. Abbott & Duncan Snidal (1998) maka dapat difahami, meski disinyalir menimbulkan relasi yang tidak seimbang antara Jawa Tengah dan Fujian namun, Jawa Tengah tetap mau mengambil inisiasi hubungan *sister province* dengan Fujian dikarenakan hubungan tersebut mampu mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, pendekatan fungsionalisme menjelaskan bahwa meskipun bentuk kerjasama tersebut tidak berlangsung dalam tataran yang bersifat *high politics*, namun bertujuan untuk menciptakan efek *spill over* sehingga meski diawali dari level yang bersifat rendah politik, namun kedepan diharapkan mampu menciptakan keuntungan yang lebih besar bagi Jawa Tengah sendiri.



Hubungan Historis Jawa Tengah Fujian

Bangsa Tionghoa atau lebih dikenal dengan sebutan Cina oleh kebanyakan masyarakat luar, merupakan salah satu dari embrio peradaban di Asia, selain India dan Persia. Keberadaan peradaban Cina telah diketahui sejak 1750-1045 SM.

(Lombard 2008:243-244).

Cina juga tercatat sebagai bangsa yang mengawali ekspedisi besar-besaran untuk mengarungi samudera luas. Sejak tahun 1404-1433, Dinasti Ming yang menjadi penguasa Cina kala itu telah mengirim ratusan armada untuk mengunjungi lebih dari 30 negara di kawasan Asia Tenggara, Samudera Hindia, Laut Merah dan Afrika Timur. Pelayaran besar ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Jika dibandingkan dengan ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di bawah pimpinan Christopher Columbus (1451-1506) dan Vasco da Gama (1460-1524), maka ekspedisi Cheng Ho lebih jauh lebih besar dalam jumlah kapal dan awakannya. Hal ini berdampak pada jangkauan pelayaran yang juga lebih luas (Kong Yuanzhi, 2005:3-5). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini orang-orang Cina menyebar ke seluruh penjuru dunia, sebab tradisi merantau dan berpindah tempat telah terbangun sejak berabad-abad silam.

Hubungan antara bangsa Cina dan penduduk di Nusantara telah terbangun sejak lama. Hal ini disebabkan oleh intensitas pelayaran antara timur dan barat Asia yang harus melalui Nusantara. Beberapa bukti menunjukkan bahwa penduduk bangsa Cina bagian selatan perlahan mulai bermigrasi ke Nusantara sejak abad ke sembilan, yakni pada masa kekuasaan dinasti Tang (618-907 M). (Benny G. Setiono, 2008:21-26). Lombard (2008:244) menyebutkan bahwa ekspansi dan perluasan masyarakat Cina dari utara ke selatan merupakan gejala yang telah ada sejak awal, yakni dari sungai Kuning (Huang Ho) ke pesisir pantai selatan. Gejala ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada "peradaban India yang lahir dari bagian utara kemudian meluas hingga ke Dekan, wilayah bangsa Dravida, dan akhirnya sampai ke Asia Tenggara".

Salah satu fase terpenting dari ekspansi orang-orang dari dataran Cina ke Nusantara adalah saat kedatangan armada laut utusan Kubilai Khan (penguasa dataran Tiongkok saat itu) untuk menyerbu Kerajaan Singasari di Jawa Timur pada tahun 1292. Beberapa sumber menerangkan bahwa kedatangan tentara itu dipicu oleh perlakuan buruk raja Singasari, Kartanegara terhadap duta yang dikirim Kubilai Khan pada tahun 1289. Setelah tiba, ribuan pasukan tersebut menyerang Singasari yang

telah dipimpin oleh Jayakatwang. Penyerangan tersebut sebenarnya diprakarsai oleh Raden Wijaya (menantu Kartanegara) yang sakit hati karena singasana kekuasaan telah direbut oleh Jayakatwang. Setelah penyerangan tersebut, Raden Wijaya kembali bertempur dengan pasukan Tiongkok. Dalam peristiwa itu, banyak prajurit Kubilai Khan yang tercerai berai dan tidak kembali sehingga memilih menetap di pesisir utara Jawa Timur hingga Jawa Tengah (Daradjadi, 2013:51-52, deGraff, 1998:147).

Masuknya etnis Cina di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya etnis ini ke Nusantara secara keseluruhan. Sejak awal, Jawa Tengah merupakan destinasi orang-orang Cina yang mencari kehidupan baru, baik dalam pertanian, pertukangan maupun perdagangan. Pada awalnya kota-kota di Jawa Tengah yang dikunjungi dan menjadi pemukiman tetap orang-orang Cina berada di pesisir pantai utara, seperti Semarang, Demak, Jepara dan Lasem. Selanjutnya, daerah pedalamanpun mulai banyak ditempati orang-orang Cina. Mayoritas pendatang Tionghoa berasal dari pesisir selatan negeri tersebut, seperti Provinsi Guangdong/Guangzow dan Hokkian/Fujian. Khusus orang-orang Hokkian, pada umumnya datang ke Jawa Tengah sebagai pelarian karena di negeri asalnya menjadi korban penindasan Dinasti Ch'ing (1644-1911) dari bangsa Manchu (Benny G. Setiono, 2008:57-59).

Salah satu fase kedatangan orang Cina di Jawa Tengah adalah pendaratan armada Cheng Ho (Zeng He dalam bahasa Mandarin) di Semarang. Meskipun dalam catatan resmi yang dibuat juru tulis Cheng Ho tidak pernah ditemukan kata Semarang, namun banyak kalangan termasuk para sejarawan meyakini bahwa Cheng Ho pernah singgah di tempat ini. Salah satu alasannya adalah berkembangnya cerita-cerita rakyat tentang Cheng Ho di Semarang, terutama di kalangan orang Cina. Sastrawan Pramodya Ananta Toer menyebutkan bahwa mungkin pada saat itu daerah ini belum bernama Semarang sehingga tidak ada kata tersebut dalam catatan ekspedisi Cheng Ho. Selain Semarang, daerah Jawa Tengah lain yang menjadi tujuan pelayaran laksamana Cheng Ho adalah Jepara dan Juwana (Daradjadi, 2013:53).

Setelah ekspedisi Cheng Ho dan mulai mapannya kekuasaan VOC di Nusantara,

umumnya orang Cina datang ke Jawa Tengah sebagai imigran, baik resmi maupun tidak resmi (imigran gelap). Untuk menuju Jawa Tengah (terutama kota Semarang) mereka menumpang jung-jung yang berlabu di Batavia. Di Batavia mereka diturunkan, dan untuk sementara ditempatkan pada gedung-gedung besar, yang oleh orang-orang Jawa disebut loji. Sejak awal abad 18 di Batavia telah didirikan Loji Semarang, yakni sebuah gedung besara yang dipergunakan untuk menampung imigran dari Cina yang bertujuan ke Semarang. Di tempat penampungan tersebut biasanya mereka mengelompokkan diri menurut daerah asal dan kesamaan dialek (Daradjadi, 2013:56).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, arus migrasi orang Cina ke Jawa Tengah terus berlanjut. Hal ini dipicu oleh semakin besarnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang ditawarkan untuk para pendatang, terutama sebagai Kuli Kontrak dan pedagang. Di Semarang, banyak orang Cina yang menjadi kaya raya dan terpandang pada masa ini. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan adalah Tan Bing masuk ke Semarang pada akhir tahun 1700-an dalam kondisi yang sangat miskin. Generasi kedua, anak Tan adalah Tan Tiang Tjhing yang mengembangkan usaha keluarga menjadi lebih besar dengan menguasai bandar opium, pasar dan monopoli garam. Pada tahun 1809 ia menjadi letenan Semarang, dan pada tahun 1829 diangkat menjadi kapten dan menjadi moyor Cina yang pertama di Semarang (James R. Rush, 2000:197-199).

Selain keluarga Tan kisah orang Cina lainnya yang sukses di Jawa Tengah datang dari keluarga Oei Tjie-sien, ayah dari "raja gula" Asia Tenggara Oei Tiong Ham. Perjalanan Oei Tjie-sien dimulai dengan menumpang sebuah juang, meninggalkan pelabuhan Amoy (Hsiamen) di Provinsi Hokkian

(Fujian dalam bahasa Madarin) menuju Semarang. Ia dilahirkan di desa Li-lim-sia, distrik Tiong-an (Tong An), Kabupaten Tjoang Yjioe, Provinsi Hokkian (Fujian dalam bahasa Madarin). Oei Tiong Ham merupakan anak pertama dari Oei Tjie-sien. Oie Tiong Ham dilahirkan di Semarang 19 November 1866 (Setiono, 2008:256-260).

Sejak akhir abad 19, Oei Tiong Ham terlibat dalam kegiatan produksi gula, yang pada puncaknya berhasil menguasai lima pabrik gula. Kelima pabrik gula tersebut adalah P.G. Redjoagung, P.G. Kreet, P.G. Tanggulangin, P.G. Pakies dan P.G. Ponen. Meskipun bisnis utamanya adalah ekspor hasil tebu terutama gula, tetapi Oei Tiong Ham juga tidak melewatkan bisnis impor barang kebutuhan seperti beras, teh dan karung goni. Untuk keperluan perluasan bisnis tersebut Kian Gwam membuka kantor di London, Amsterdam, Singapura, Calcutta, Shanghai, dan sebagainya. Oei Tiong Ham wafat secara mendadak pada tahun 1924 karena serangan jantung (Setiono, 2008:263).

Jika dilihat dari daerah asal di dataran Tiongkong, etnis Tionghoa di Jawa Tengah nampaknya didominasi oleh orang-orang dari Provinsi Hokkian/Fujian. Selain dibuktikan oleh keberadaan keluarga Oei Tiong Ham, bukti-bukti toponim juga membuktikan dominasi orang Hokkian di Jawa Tengah. Penyebutan Cheng Ho misalnya, adalah salah satu sumbangan orang Hokkian yang tetap populer hingga saat ini di Indonesia. Dalam bahasa Mandarin sebutan Cheng Ho adalah Zeng He. Selain bukti tersebut, statistik jumlah penduduk Hindia Belanda tahun 1930 juga menunjukkan besarnya jumlah orang Hokkian dibandingkan kelompok etnis Tionghoa lainnya. Gambaran lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah Etnis Tionghoa di Hindia Belanda Menurut Sensus Tahun 1930.

Asal Daerah/Suku	Janis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki -laki	Percmpuan	
Hokkian	309.253	245.728	554.981
Hakka	124.905	75.831	200.736
Kwungfu	97.740	38.390	136.130
Teo Chew	63.423	24.389	87.809
Lain -lain	123.941	64.468	188.409
	Total		1.168.065

Sumber: Setiono, 2008:255

Melihat data di atas, sangat wajar jika pengaruh orang Hokkian cukup besar di kalangan etnis tinghoa di Hindia Belanda termasuk di Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan suku-suku lainnya, orang Hokkian sangat dominan sehingga dapat menyelenggarakan sekolah dengan bahasa pengantar Hokkian, seperti yang pernah diikuti Oei Tiong Ham di Semarang.

Sedangkan ketika berbicara terkait tinjauan historis kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian Kerjasama provinsi kembar di antara Fujian dan Jawa Tengah sendiri baru mulai dilaksanakan pada 12 Juni 2003 (www.en.fjta.com). Namun, proses terbentuknya kerjasama tersebut memakan waktu yang dapat dikatakan cukup lama. Dalam konteks sejarah Indonesia modern, maka keberadaan kerjasama *sister province* Jateng-Fujian, tidak dapat dilepaskan dari pasang-surutnya hubungan Indonesia dan Cina.

Hubungan antara Indonesia dan Cina sendiri mengalami fase nadir ketika terjadi peristiwa G30S/PKI. Hubungan yang cukup dekat antara Cina dan Indonesia pada periode 1959 hingga fase 60-an menjelang peristiwa *gestapu* oleh sejumlah kalangan dianggap sebagai fase intervensi Cina kepada Indonesia. Di sisi lain keberadaan Cina dianggap memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa 30 September 1965. (Sukma 2005:44).

Kondisi tersebut diperparah dengan Kedutaan Besar Cina di Jakarta pada waktu itu menolak mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan terhadap para Jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut (Taylor 1976:83). Tidak hanya itu, Cina bahkan memberikan sejumlah suaka pada sejumlah mantan petinggi PKI di Cina, dan Cina bahkan mengeluarkan sejumlah propaganda lewat stasiun Radio Cina untuk menggulingkan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Kondisi tersebut berimplikasi pada memuncaknya ketegangan hubungan Diplomatik Indonesia-Cina (Sukma 2005:49). Puncaknya, pada 30 Oktober 1967, Jakarta akhirnya memutuskan untuk membekukan hubungannya dengan Beijing (Sukma 1994:55).

Putusnya hubungan diplomatic RI-Cina tersebut berlangsung hingga dibukanya kembali hubungan diplomatic RI-Cina melalui normalisasi

hubungan RI-Cina di era akhir Presiden Soeharto (Sukma 2005:162).

Dengan dibukanya kembali hubungan diplomatik tersebut, memberikan babak baru hubungan RI-Cina. Namun, dengan dibukanya kanal politik tersebut, tidak menandakan bahwa dibukanya budaya Cina dan menjadi budaya yang bebas tumbuh di Indonesia. Keberadaan kalangan Cina perantauan, yang sejak jaman Orde Baru mendapatkan proses alienasi, dan pengekanan termasuk dalam hal ekspresi budaya mendapatkan titik terang justru paska tumbanganya rezim Orde Baru. Meletusnya Reformasi membawa angin segar bagi konstelasi politik Indonesia. Dalam kaitannya dengan hubungan RI-Cina, Gus Dur mengeluarkan kebijakan untuk memperbolehkan ekspresi budaya Cina di Indonesia. Hal ini berujung pada semakin mesranya hubungan Indonesia dengan Cina. Kanal politik yang telah terbuka pada era Soeharto, justru mendapatkan kesempatan untuk semakin diperkuat pada era Gus Dur (www.economist.com 07/01/2010).

Melalui Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 2000, tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina maka memberikan dua dampak sekaligus. Bagi hubungan Jakarta-Beijing memberikan kesempatan hubungan yang lebih luas dalam berbagai macam aspek, termasuk ekonomi, dan budaya. Sedangkan bagi kalangan Cina perantauan atau warga Negara Indonesia keturunan cina memberikan kesempatan ruang gerak yang lebih luas.

Implikasi pertama terkait semakin terbukanya hubungan Indonesia dengan Cina, terutama jika dikaitkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu, merupakan awal dari kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian. Pada Era Gus Dur, kerjasama dengan Cina mulai mendapat peningkatan cukup signifikan. Salah satunya adalah kerjasama ekonomi di bidang perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) / Kelapa Sawit. Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu-Luhut B. Panjaitan, dalam kunjungannya di Cina terkait KTT APEC melakukan kesepakatan kredit ekspor dan peningkatan kuota ekspor CPO Indonesia ke Cina. Jika sebelumnya kuota CPO Indonesia hanya sebesar 1,2 Juta Ton, meningkat menjadi 1,6 Juta Ton (Koran Tempo 15/06/2001).

Bagi Jawa Tengah pada khususnya imbas dari terbukanya hubungan Diplomatik dengan Cina membuka pintu gerbang kerjasama yang lebih intens dengan Cina. Ir. Maruli Pakpahan mantan Kabag Kerja Sama Luar Negeri Biro Otda dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa pada tahun 1999, Gubernur Jawa Tengah-Mardiyanto melakukan kunjungan ke Cina dengan sejumlah pengusaha asal Indonesia. Hal ini ditujukan sebagai bentuk upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah khususnya dengan Cina. Hal ini merupakan babak awal terbentuknya kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian (wawancara Maruli Pakpahan 2013).

Dampak dari kunjungan itu, keberadaan budaya Cina kembali menjadi lebih marak di Jawa Tengah khususnya Semarang. Maruli Pakpahan yang pada waktu itu merupakan bagian dari kabag kerjasama luar negeri provinsi Jateng menyatakan bahwa paska kunjungan Gubernur Jateng, Mardiyanto pada waktu itu adalah dipajangnya Leang-Leong atau naga leong yang merupakan salah satu symbol seni budaya Cina di Wisma Perdamaian (wawancara Maruli Pakpahan 2013).

Lebih lanjut Maruli mengatakan bahwa sejarah munculnya kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kunjungan delegasi Pemprov Jateng dan sejumlah pengusaha Jawa Tengah yang ternyata masih memiliki hubungan darah dengan Fujian pada tahun 2001. Maruli menambahkan, Turut serta dalam rombongan tersebut adalah pengusaha Jawa Tengah seperti Alvian Lie yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Sehat Jamu, Direktur PT. Alegori Semarang, dan Direktur PT. Trans Pacific Trading Semarang. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan sebelumnya oleh Gubernur Jateng Mardiyanto pada waktu itu dengan sejumlah pengusaha Jawa Tengah keturunan cina, seperti tokoh taipan Indonesia Liem Sio Liong pemilik Salim Group, Hari Darmawan pendiri Matahari, Kwik Kian Gie dan tokoh pengusaha Cengkeh Budi Dharmawan (wawancara Maruli Pakpahan 2013).

Yang menarik adalah, Liem Sio Leong dan sejumlah pengusaha keturunan Cina yang ada di Jawa Tengah ternyata memiliki darah Fujian. Bahkan Liem Sio Leong sendiri tercatat lahir di

Daerah Fuqing, Provinsi Fujian-Cina (www.tempo.co 11/06/2012). Selain itu pengusaha Semarang yang juga merupakan ketua paguyuban Warga Tionghoa Jateng, serta ketua Yayasan Klenteng Tay Kak Sie- Sindhu Darmali juga merupakan pengusaha keturunan Fujian (www.suaramerdeka.com 14/09/2005).

Gerbang kerjasama jusr semakin terbuka lebar, dikarenakan keberadaan otonomi daerah melalui payung UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara teknis memberikan wewenang bagi daerah, untuk melakukan perjanjian internasional, termasuk dalam hal ini kerjasama internasional. Ditengah terbukanya arus hubungan kerjasama dengan Cina dan dibukanya berbagai kanal termasuk kanal ekonomi dan budaya Cina; serta keberadaan otonomi daerah, kemudian disambut oleh Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu untuk semakin mempererat hubungan dengan Cina, maka tepatnya pada 12 Juni 2013, Provinsi Fujian dan Jawa Tengah resmi menandatangani kerjasama *sister province* (www.en.fjta.com).

Keuntungan Kerjasama

Kerjasama *sister Province* Jawa Tengah dengan Fujian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kerjasama bisnis dan faktor kedekatan histori demografis antara Jawa Tengah dengan Fujian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Jawa Tengah ternyata memiliki kedekatan historis yang cukup kuat dengan Cina utamanya Provinsi Fujian. Kondisi tersebut memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi pelaksanaan kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah-Fujian.

Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama *sister Province* Jawa Tengah-Fujian, keberadaan faktor kedekatan demografis terbukti sangat membantu pelaksanaan kerjasama ini. Misalnya, sebagai bentuk konkrit pelaksanaan kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian, pada 4-10 September 2005 rombongan Pemprov Jateng yang dipimpin oleh Gubernur Jateng-Mardiyanto pada waktu itu datang untuk melakukan kunjungan dalam rangka realisasi kerjasama Jawa Tengah dengan Fujian. Dalam rombongan tersebut Gubernur disertai oleh sejumlah pengusaha Tionghoa Semarang yang telah memiliki reputasi di negeri leluhurnya-Fujian. Pengusaha-pengusaha itu merupakan sebagian kecil dari para *hoakiou* (perantauan cina), tetapi telah

memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Bahkan sejumlah dari pengusaha tersebut merupakan tokoh sentral Tionghoa di Indonesia. Sebagai contoh, Hoo Liong Tiau yang merupakan ayah dari Budi Purnomo, merupakan Ketua Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (Porinti). Selain Hoo Liong Tiaw, yang lebih akrab disapa sebagai Pak Hoo dan putranya Budi Purnomo yang merupakan wakil dari Group Polyplas, hadir pula dalam rombongan Jawa Tengah ke Fujian pada waktu itu sejumlah pengusaha Indonesia lainnya, yakni: Sindu Dharmali (Palur Raya), Restu Riady Treano Santoso (Sri Ratu), Yustinus Herutanaka Pratignyo (Sahabat Mulia Sakti), Tunggul Ardianto (Tunggul Sakti Sejatera), Khoendarto Kusuma (IPU), David Herman Jaya (Mekar Armada Jaya), Hendra Soegiarto (Gumaya), Samsoe Hidayat (Sango), Jimmy Lukito (Buana Motor), dan Tan Weng Long (Swiss Bakery). Keberadaan sejumlah pengusaha tersebut ternyata justru memperlancar rencana kerjasama bisnis dan investasi antara Jawa Tengah dan Fujian (www.suaramerdeka.com 12/09/2005).

hubungan yang akrab dengan kalangan pemerintah Fujian. Hubungan akrab tersebut bisa datang dari kekerabatan atau kenalan lama. Para pengusaha keturunan cina tersebut paham betul tentang apa yang diperlukan oleh setiap provinsi dan juga paham menembus jaringan birokrasi di Fujian (wawancara Yeru Salimianto 2013).

Hal senada juga dinyatakan oleh Maruli Pakpahan yang kini menjabat sebagai sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah, bahwa pengusaha diharapkan mampu menjadi "Middle man" bagi terlaksananya kerjasama Jawa Tengah - Fujian. Konsep "middle man" ini berarti pengusaha tersebut mampu menjadi jembatan penghubung berbagai kesulitan terutama birokrasi dan informasi antara dua provinsi (wawancara Maruli Pakpahan 2013).

Pelaksanaan konsep "middle man" tersebut dapat dijumpai pada kunjungan delegasi Jawa Tengah pada 4-10 September tersebut ke Fujian. Dalam sebuah kesempatan Pertemuan Dagang antara pengusaha Jawa Tengah dan pengusaha Fujian di Hotel Golden Resource International, Keberadaan sejumlah pengusaha keturunan Fuzho-

Tabel 2
Daftar Pengusaha Indonesia Keturunan Fujian

No	Nama	Perusahaan
1	Hoo Liong Tiau	Polyplas
2	Budi Purnomo	Polyplas
3	Sindu Dharmali	Palur Raya
4	Restu Riady Treano Santoso	Sri Ratu
5	Yustinus Herutanaka Pratignyo (Nyoo Sik Hok)	Sahabat Mulia Sakti
6	Tunggul Ardianto	Tunggul Sakti Sejahtera
7	Khoendarto Kusuma	IPU
8	David Herman Jaya	Mekar Armada Jaya
9	Hendra Soegiarto	Gumaya Group
10	Samsoe Hidayat	Sango (inax internasional)
11	Jimmy Lukito	Buana Motor
12	Tan Weng Long	Swiss Bakery

Sumber: *Suara Merdeka*

Hasil wawancara dengan mantan Ketua Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu, Yeru Salimianto menyatakan bahwa Para memang memegang peranan penting sebagai perantara perdagangan Jawa Tengah-China. Kebanyakan para *hoaqiao* (Perantau Cina) memiliki

Fujian asal Semarang, justru mempermudah cairnya suasana. Pada waktu itu Sindu Dharmali seorang pengusaha keturunan Fujian asal Jawa Tengah muncul meramaikan suasana dengan hanya mengatakan ajakan kepada koleganya yang ada di Fuzho-Fujian untuk melakukan investasi di Jawa Tengah. Sindu kemudian juga menceritakan kondisi

Jawa Tengah yang kondusif dan keberadaan komunitas Cina di Semarang. Hal tersebut kemudian direspon sangat positif oleh sejumlah pengusaha Fujian yang kemudian ingin melakukan investasi di Jawa Tengah (Wawancara Yeru Salimianto 2013).

Misi dagang serupa juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya. Pada 4-11 September 2006, Delegasi Pemprov Jateng yang terdiri dari Wakil Gubernur Jateng waktu itu, Ali Mufiz beserta sepuluh pengusaha Semarang melakukan misi dagang ke Fuzhou dan Xiamen-Fujian. Dalam misi dagang itu, Wagub disertai sepuluh pengusaha Tionghoa asal Semarang yang telah memiliki reputasi di negeri leluhurnya. Pengusaha-pengusaha itu merupakan sebagian kecil dari para hoakiaou (cina perantauan), Para pengusaha Jawa Tengah tersebut adalah Budi Santoso (Mineral Water), Budi Kurniawan (PT Sempurna Boga Makmur), Giantoro Wibowo (PT Indo Perkasa Real Estate), Yono Sukanto (Swiss Bakery), Lucas Wibowo (Kampung Laut Restaurant), Sunarto (Cheng Ho Organizer), Sindu Dharmali (PT Palur Raya), dan Siswa Sandjaja Chandra (PT Nusantara Tour & Travel), serta satu-satunya pengusaha wanita Hj Nanuk Widyaningrum (Batik Al-Bayo Pekalongan). Dalam pertemuan tersebut hadir pula 40 pengusaha Cina yang akan berinvestasi di Jawa Tengah (www.suaramerdeka.com 15/09/2006)

Selain itu, secara riil keberadaan kedekatan historis ini juga semakin memperlancar keadaaan kerjasama *sister province* Jateng-Fujian. Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam sejumlah misi dagang ke Fujian Cina, pada 4-10 September 2005, serta 4-11 September pada tahun 2006 telah memberikan sejumlah dampak positif baik dalam tataran ekonomi maupun budaya. Maruli Pakpahan Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jateng menyatakan bahwa, memang telah terdapat sejumlah dampak positif berupa investasi ekonomi, namun juga terdapat sejumlah keuntungan *intangible* yang diperoleh oleh Jawa Tengah dalam kerjasama *sister province* ini (wawancara Maruli Pakpahan 2013).

Lebih lanjut, Maruli Pakpahan menyampaikan bahwa memang Setelah *Sister Province* berlangsung banyak keuntungan-keuntungan yang bersifat *intangible* yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai contoh, dikarenakan Jawa Tengah memiliki hubungan *Sister Province* dengan Fujian maka pada ajang The 16th China International Fair for Investment and Trade (CIFIT) 2012 pada tanggal 8-11 September 2012 Jawa Tengah bisa membuka stand secara gratis pada ajang tersebut. Umumnya untuk membuka stand pada ajang tersebut membutuhkan biaya sewa yang sangat mahal, dan dikarenakan terdapat hubungan *Sister Province* maka Provinsi Jawa Tengah dapat memiliki stand secara gratis (Wawancara Maruli Pakpahan).

Delegasi dari Jawa Tengah yang diwakili oleh BPMD Prov. Jateng, Biro Otda dan Kerjasama SETDA Prov. Jateng, Dinperindag Prov. Jateng, Dinbudpar Prov. Jateng, PT. Gendis Multi Manis, dan GM Hotel Horison Semarang merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain Indonesia, ada beberapa Negara di Asia, Eropa dan Afrika yang juga menghadiri kegiatan tersebut. Selama pameran yang diselenggarakan di Xiamen International Conference and Exhibition Center (XICEC) di Xiamen, stand Provinsi Jawa Tengah dikunjungi oleh 215 orang, dengan pertanyaan menyangkut posisi, prospek, serta peluang investasi, perdagangan, pariwisata, dan pertanyaan terkait dengan pelayanan perizinan di Jawa Tengah (www.jatengprov.go.id 29/10/2012).

Selain itu, hasil dari pertemuan CIFIT tersebut disepakati upaya pertukaran staf oleh Komite Bersama Jawa Tengah-Fujian. Pertukaran staf serta rencana kunjungan ke Jawa Tengah dalam rangka Visit Jateng 2013 dan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2013 akhirnya pun dapat direalisasikan pada tahun 2013. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keuntungan yang dapat diperoleh meski tidak dalam bentuk kuantitas, namun merupakan bentuk keuntungan *intangible* kerjasama *sister province* (wawancara Maruli Pakpahan 2013).

Dampak lain dari keikutsertaan Jawa Tengah pada kegiatan pameran CIFIT 2012, tercatat beberapa kepeminatan yang mengemuka dari peserta pameran tersebut terkait investasi di Jawa Tengah, antara lain Geothermal di Telomoyo, industri kertas bahan baku batu (Galian C, impor batok kelapa, impor kopi dari Jawa Tengah (kopi Tlogo), industri tepung tapioca, industri furniture, dan kerjasama pengembangan industri gula di

Jawa Tengah (www.jatengprov.go.id 29/10/2012).

Dampak positif lain adalah kunjungan Kadin Cina ke PT. Sritex-Sukoharjo pada 8 Juni 2012. Dalam kunjungan tersebut Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam *China Chamber of Commerce for Textile* (Kadin China), Jumat (8/6) mengunjungi PT Sritex di Sukoharjo. Kunjungan yang didampingi Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat tersebut, salah satunya untuk menjajaki investasi di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah (www.timlo.net 08/06/2012).

Selain sejumlah keuntungan *intangible* diatas sebenarnya terdapat sejumlah keuntungan yang memang bersifat *tangible* atau terukur. Keberadaan keuntungan *tangible* ini sebenarnya merupakan bentuk turunan, atau *spill over* dari keuntungan yang bersifat *intangible* diatas. Sebagai contoh, keberadaan kedekatan demografis-historis tokoh-tokoh pengusaha Cina Indonesia dengan Fujian memberikan dampak keterbukaan dan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi investor asal Fujian. Kondisi tersebut memang dapat dikatakan sebagai bentuk keuntungan *intangible*, namun pada gilirannya akan mampu membawa keuntungan terukur tersendiri.

Sekretaris BPMD Provinsi Jateng, Ir. Maruli Pakpahan (2013), sebagai bentuk keuntungan *tangible* dari keberadaan kerjasama *sister province* Jateng-Fujian. Dikarenakan sejumlah kedekatan demografis, maka sejumlah pengusaha keturunan Fujian di Indonesia kemudian justru mampu berperan sebagai *middle man* yang mempromosikan Jawa Tengah sebagai daerah tujuan investasi yang strategis.

Dari tabel diatas, dapat diamati, bahwa nilai investasi perusahaan-perusahaan asal Cina di Jawa Tengah dapat dikatakan cukup besar. Jika dijumlah, besaran nilai investasi mencapai sejumlah 10.722.000 US\$, atau sekitar 100 Miliar Rupiah. Jumlah tersebut juga mampu membuka sejumlah lapangan kerja baru di Jawa Tengah, dan sekaligus menghidupkan iklim industri di Jawa Tengah.

Selain itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013) bahwa Cina merupakan Negara yang memiliki posisi sentral dalam perekonomian Jawa Tengah. Pada bulan Januari hingga Juli 2013 misalnya Cina merupakan Negara nomor dua terbesar yang memiliki kerjasama ekonomi dengan Jawa Tengah baik dalam tataran ekspor maupun import. Selama

Tabel 3
Daftar Investasi Perusahaan Cina di Jawa Tengah

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Bidang Usaha	Investasi (US\$)
1	PT. C&C Furniture	Kab. Jepara	Industri Kayu	500.000
2	PT. Eastmark International Indonesia	Kab. Temanggung	Industri Kayu	1.450.000
3	PT. Intech Anugrah Indonesia	Kota Semarang	Industri Lainnya	2.250.000
4	PT. Kurnia Santosa	Kota Semarang	Perdagangan & Reparasi	202.020
5	PT. Tianshi Semarang	Kota Semarang	Perdagangan & Reparasi	200.000
6	PT. Tiga Sembalin Sukses Abadi	Kota Semarang	Perdagangan & Reparasi	350.000
7	PT. Yang Ming Internasional	Kota Semarang	Industri Kayu	2.000.000
8	PT. Golden Prima Santosa	Kota Semarang	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	3.750.000

Sumber: BPMD Provinsi Jawa Tengah

Pada tabel diatas misalnya, dapat dijumpai sejumlah kegiatan investasi yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha asal negeri cina. Keberadaan sejumlah investasi dari Cina tersebut diakui oleh

medio Januari hingga Juli 2013, Cina menyumbang 11,18% dalam tataran ekspor Jawa Tengah dan 12,96% dari total impor Jawa Tengah.

Tabel 4
 Nilai Ekspor Jawa Tengah Menurut Negara Tujuan Utama
 Juli 2013

Negara Tujuan	Nilai FOB (Juta US\$)						% Peran thd Total Ekspor Jan-Juli 2013
	Jun'13	Juli'13	Perubahan Juli'13 terhadap Jun'13	Jan-Juli 2012	Jan-Juli 2013	Perubahan Jan- Juli 2013 terhadap Jan-Juli 2012	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
411. UNITED STATES	96,52	113,12	16,60	593,58	676,74	83,18	21,74
116. CHINA	49,17	56,74	7,57	214,42	347,99	133,58	11,18
111. JAPAN	40,13	46,96	6,83	260,14	302,60	42,46	9,72
124. MALAYSIA	50,10	30,82	-19,28	181,84	227,10	45,26	7,30
122. SINGAPORE	24,95	5,87	-19,08	100,54	149,60	49,06	4,81
514. GERMANY, FED. REP. OF	14,47	23,09	8,62	132,12	115,72	-16,40	3,72
114. KOREA, REP. OF	14,52	15,20	0,68	90,23	97,41	7,18	3,13
115. TAIWAN	9,53	15,09	5,56	72,29	81,15	8,86	2,61
511. UNITED KINGDOM	10,42	12,69	2,27	77,49	78,95	1,47	2,54
154. TURKEY	7,73	12,61	4,88	64,26	74,57	10,30	2,40
Total 10 Negara Tujuan Utama	317,55	332,20	14,65	1 786,89	2 151,83	364,94	69,13
Negara lainnya	152,54	148,74	-3,80	950,17	961,09	10,92	30,87
Total	470,10	480,94	10,85	2 737,06	3 112,92	375,86	100,00

Sumber: Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perimbangan Keuangan, Tinjauan Ekonomi & Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan memang bahwa Cina memang memiliki fungsi yang strategis bagi Jawa Tengah. Dengan diadakannya kerja sama sister province tersebut, maka justru semakin terjadi peningkatan kerja sama. Hal ini dikarenakan keberadaan kerjasama bisnis yang memang justru banyak dilakukan oleh masyarakat di kedua Provinsi.

Kondisi tersebut merupakan pelaksanaan keberadaan konsep *people to people diplomacy*. Dalam konsep diplomasi ini, bukan Negara yang berfungsi sebagai pelaksana diplomasi, namun justru masyarakat yang melakukan diplomasi. Dalam konteks kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian para pelaku usaha terutama pengusaha Indonesia keturunan Fujian menjadi *middle man* atau penghubung kerjasama ekonomi antara kedua provinsi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa meski kerja sama *sister province* dilakukan dalam konteks diberlakukannya ACFTA yang disinyalir cenderung merugikan, implementasi kerjasama *sister province* Jawa Tengah-Fujian dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dikarenakan dalam praktek *sister province* Jawa Tengah-Fujian, actor utama

dalam kerjasama provinsi kembar ini adalah para pengusaha Indonesia keturunan Fujian. Kondisi ini juga ditambah kedekatan bisnis yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut. Dengan terdapatnya ikatan historis demografis serta ekonomi yang kuat tersebut menjadi kunci keberhasilan peran mereka sebagai *middle man* dalam menjalankan *people to people diplomacy*. Kondisi ini yang sering kali tidak ditemui pada sejumlah kerja sama kota atau provinsi kembar lain di Indonesia.

Konsep kerjasama kota atau provinsi kembar yang justru memberikan penekanan penting bagi peran masyarakat sebagai actor utama diplomasi ternyata justru ditopang dengan kedekatan-kedekatan historis demografis. Oleh karena itu penelitian ini sebenarnya mampu memberikan salah satu prasyarat penting bagi berhasilnya sebuah kerja sama *sister province* kedepannya.

Dalam hal motif tetap diberlakukannya kerja sama *sister province* antara Jawa Tengah dan Fujian meski terdapat sejumlah kritikan akibat ACFTA, maka jawabannya adalah dapat dijumpai bahwa dalam kerja sama provinsi kembar Jateng dengan Fujian terdapat keuntungan yang diperoleh. keuntungan tersebut pada awalnya memang bersifat tidak terukur (*intangibile*) namun pada gilirannya mampu memberikan *spill over effect* sehingga menghasilkan sejumlah *tangible effect* yakni keuntungan-keuntungan bisnis dan investasi.

Dalam kerangka ACFTA yang cenderung dianggap merugikan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng Fujian dalam bentuk kerja sama *sister province* justru merupakan sebuah langkah strategis. Langkah yang merupakan bentuk manuver berselancar di atas tsunami gelombang ekspansi *Free Trade Area* dengan Cina. Hal ini merupakan keuntungan strategis yang dimiliki oleh Jawa Tengah akibat dimilikinya hubungan provinsi kembar dengan Provinsi Fujian, Cina.

Daftar Pustaka

- Andreas Maryoto, *Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009).
- Armstrong, Matt. 2009. "Sister Cities: the quintessential and yet underappreciated public diplomacy program," http://mountainrunner.us/2009/08/sister_cities.html. Diunduh 3 Dec 2009.
- Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Trans Media, 2008).
- Bontenbal, Marike, dan Paul van Lindert. 2009. "Transnational city-to-city cooperation: Issues arising from theory and practice," *Habitat International*, www.elsevier.com/locate/habitatint. [Diakses 8 Maret 2010.]
- Chicago Sister Cities International. "History of Sister City International". [online] dalam <http://chicagosistercities.com/misson/>. [diakses pada 14 Maret 2013].
- Daradjadi, *Geger Pecinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa-Jawa Melawan VOC* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013).
- De Castro, Isagani. 2002. "'Big Brother' China Woos ASEAN". [online] dalam http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/DK06Ae02.html. [diakses pada 14 Maret 2013].
- Edi Winarto, *Masyarakat Tionghoa dan Peranannya dalam Kerajinan Batik Lasem Tahun 1930-2009* (Tesis Pada Magister Ilmu Sejarah UNDIP Semarang, 2010).
- Etik Mahareni D. P., *Sekolah Khong Kauw (SKK) Semarang 1950-1975: Pembentukan Identitas, Pendidikan Karakter dan Strategi Adaptasi Masyarakat Tionghoa* (Tesis Pada Magister Ilmu Sejarah UNDIP Semarang, 2012).
- Farida, Elfia & Darminto H. et al. 2004. Pelaksanaan Kerjasama Kota Kembar (*Sister City Cooperation*) Antara Semarang dengan Brisbane dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Friedman, Thomas L. 2005. *The World is Flat: A Brief History of the Twenty First Century*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Fujian Tourism. Friendly Relation. [online] dalam http://en.fjta.com/FJTIS/FL/Relation/RelationDetail.aspx?mt_id=4&relaid=30. [diakses pada 14 Maret 2013].
- Graff, H. J. de, et. al. *Cina Muslim Di Jawa Abad XV dan XVI antara Historitas dan Mitos* terjemahan Alfajri (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).
- Indonesia Business Links. 2011. Redam Bahaya ACFTA dengan Wirausaha. [online] dalam <http://www.ibl.or.id/index.php?id=article&id=details&articleID=735&lang=en>. [diakses pada 14 Maret 2013].
- James R. Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910* terjemahan E. Setiyawati Alkhatab (Yogyakarta: Matabangsa, 2000).
- Kenneth W., and Duncan Snidal. (1998) "Why States Act Through Formal International Organizations." *Journal of Conflict Resolution*. 42 (1)
- Keohane, Robert O dan Nye, Joseph S., 2000. *Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)*. Carnegie Endowment for International Peace Stable. dalam <http://www.jstor.org/stable/1149673> [diakses pada 9 September 2008].
- Koran Tempo. Cina Tambah Kuota CPO Indonesia. 15 Juni 2001.
- Latif, Syahid & Ajeng M. Triyanti. 2011. "ACFTA, Hanya Indonesia yang Alami Defisit" [online] dalam <http://www.dailymedia.com>

- <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/217953-acfta--hanya-indonesia-yang-alami-defisit>. [diakses pada 14 Maret 2013].
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia* terjemahan Winarsih Partaningrat Arifin, et. al. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- McGowan, Lee, 2007. *Theorizing European Integration: Revisiting Neofunctionalism and Testing Its Suitability for Explaining the Development of EC Competition Policy?* [online] dalam http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2007_003a/50 [diakses pada 19 Desember 2008].
- Mely G. Tan, "The Ethnic Chinese in Indonesia: Trial and Tribulation" dalam F. Sleeman, et. al, *Struggling in Hope: A Tribute to the Rev. Dr. Eka Darmaputera* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1999).
- Pramono, Sugiarto. 2009. "Faktor Pendorong Melakukan Kerjasama Sister Province Jawa Tengah-Queensland (Australia). dalam *Eksplanasi*. Vol 4 no.8 edisi oktober 2009. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Pusat Administratif Kerjasama Luar Negeri. [online] dalam <http://akln.setjen.depdagri.go.id/depdagri/index.php?act=kegiatan&id=39&id1=2>. [diakses pada 20 Maret 2010].
- Reid, Anthony, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1650; jilid 2: Jaringan Perdagangan Global* terjemahan R. Z. Leirissa dan P. Soemitro (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Riyanto, Agus. 2010. Muhibah Gubernur Jawa Tengah ke Sister Province Queensland Australia [online] dalam <http://www.pdkjateng.go.id/index.php/sekbid/sekretariat/222-muhibah-gubernur-jawa-tengah-ke-sister-province-queensland-australia>. [diakses pada 14 Maret 2013].
- Romein, J. M., *Aera Eropa; Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum* terjemahan Noer Toegiman, (Bandung: Ganaco N.V., 1956).
- Sasongko, Haryo, 2002. "Manfaat Kerjasama Perkotaan di Era Otonomi Daerah," Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Fasilitas pelaksanaan Kerjasama Perkotaan di Jakarta, 10-11 September 2002 [online] dalam www.usdrp-indonesia.org/files/downloadCategory/54.pdf. [diakses pada 20 Maret 2010].
- Scholte, Jan Art. 2000. *Globalization: A Critical Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Suhartati, *Mengungkap Akulturasi Budaya Jawa, Cina dan Belanda Melalui Motif Batik Semarang Tahun 1860-1975* (Tesis di Magister Ilmu Sejarah UNDIP Semarang, 2012).
- Sukma, Rizal, 1994. "Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi", dalam Bandoro, Bantarto [ed] *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS.
- Taylor, Jay. 1976. *China and Southeast Asia Peking's Relation with Revolutionary Movements*. New York: Praeger.
- Tempo. 2012. "Disini Liem Sio Liong Lahir". [online] dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/06/11/093409766/Di-Sini-Liem-Sioe-Liong-Lahir>. Diakses 02/11/2013.
- Wright, Artur W., "Historiografi Cina", dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985).
- www.librarything.com. *Sejarah Orang-Orang Tionghoa di Indonesia*. [online] <http://www.librarything.com/work/9254319> ,, [diakses tanggal 06 November 2013].
- www.people.com.cn. 2005. Zheng He's spirit of peaceful diplomacy highlighted in Semarang. [online] dalam http://english.people.com.cn/200508/03/eng20050803_199897.html. [diakses pada 14 Maret 2013].
- www.sister-cities.org. About Sister Cities International. [online] dalam <http://www.sister-cities.org/about-sister-cities-international>. [diakses pada 14 Maret 2013].

Yuwangzi, Kong, *Muslim Tiongkok Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005).

Zelinsky, Wilbur. 1991. "The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective" dalam *Annals of the Association of American Geographers* Vol.81, No.1 (Mar., 1991). New York: Taylor & Francis, Ltd.